



## **Analisis Nilai Wajar PSAK 68 terhadap Relevansi dan Keandalan Laporan Keuangan Emiten Sektor Keuangan dan Properti**

**Mukhamad Lucky Satria Nugraha<sup>1</sup>, Aldo Wahyu A<sup>2</sup>, Farid Rifa'i<sup>3</sup>,  
Jenio Fransiscus Sinaga<sup>4</sup>**

Akuntansi, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [2332500616@student.budiluhur.ac.id](mailto:2332500616@student.budiluhur.ac.id)

Diterima: 17-11-2025 | Disetujui: 27-11-2025 | Diterbitkan: 29-11-2025

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the impact of the implementation of PSAK 68 concerning Fair Value Measurement and Disclosure on the relevance and reliability of financial reports for issuers in the financial and property sectors in Indonesia. Data were obtained from the annual financial reports of public companies for the 2018–2023 period, analyzed using a descriptive quantitative approach and multiple regression analysis. The results indicate that the implementation of PSAK 68 has a positive and significant impact on improving the relevance of financial reports, particularly for property companies with a high proportion of non-financial assets and sensitive to market fluctuations. However, the impact on report reliability remains variable, particularly for Level 3 fair value measurements, which involve numerous subjective assumptions and management estimates. These findings emphasize the importance of increasing transparency, appraiser competence, and the role of auditors in ensuring the objectivity of the implementation of PSAK 68 to strengthen the credibility of financial reporting in Indonesia.

Keywords: PSAK 68, fair value, financial report relevance, information reliability, financial sector, property sector

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan PSAK 68 tentang Pengukuran dan Pengungkapan Nilai Wajar terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan pada emiten sektor keuangan dan properti di Indonesia. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan publik periode 2018–2023, yang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 68 berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan relevansi laporan keuangan, terutama pada perusahaan properti yang memiliki proporsi aset non-keuangan tinggi dan sensitif terhadap fluktuasi pasar. Namun, pengaruh terhadap keandalan laporan masih bervariasi, khususnya pada pengukuran nilai wajar Level 3 yang melibatkan banyak asumsi subjektif dan estimasi manajemen. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi, kompetensi penilai, serta peran auditor dalam memastikan objektivitas penerapan PSAK 68 guna memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan di Indonesia.

**Kata kunci:** PSAK 68, nilai wajar, relevansi laporan keuangan, keandalan informasi, sektor keuangan, sektor property

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya integrasi pasar keuangan, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika arus modal lintas negara telah mengubah secara fundamental cara perusahaan menyajikan informasi keuangan. Laporan keuangan yang dulunya berfungsi sebagai alat pelaporan historis kini berkembang menjadi sarana strategis untuk menyampaikan posisi ekonomi terkini perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kebutuhan akan informasi yang relevan, andal, dan komparatif menjadi semakin penting, terutama bagi investor dan analis pasar modal yang menuntut representasi yang jujur terhadap nilai ekonomi suatu entitas. Oleh karena itu, munculnya konsep pengukuran nilai wajar (*fair value measurement*) merupakan salah satu tonggak utama dalam evolusi pelaporan keuangan modern (Barth & Landsman, 2018).

Konsep nilai wajar dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara informasi historis dengan realitas ekonomi yang dinamis. Nilai wajar mencerminkan estimasi harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam praktiknya, nilai wajar menawarkan pendekatan berbasis pasar (*market-based measurement*), bukan berbasis biaya historis (*cost-based measurement*), sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap nilai ekonomis terkini. Namun demikian, penerapan nilai wajar juga menimbulkan perdebatan konseptual yang mendalam terkait dengan sejauh mana informasi tersebut dapat dianggap andal, mengingat adanya potensi subjektivitas dalam menentukan nilai yang tidak memiliki pasar aktif.

Di Indonesia, penerapan konsep nilai wajar diakomodasi melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar, yang merupakan adopsi dari IFRS 13 Fair Value Measurement. PSAK ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2015 dan menjadi standar payung yang mengatur seluruh aspek terkait pengukuran nilai wajar untuk berbagai jenis aset dan liabilitas. PSAK 68 tidak hanya mendefinisikan nilai wajar, tetapi juga menetapkan metodologi pengukuran yang terdiri atas tiga hirarki input: Level 1 (harga kuotasi di pasar aktif), Level 2 (input observabel selain harga kuotasi), dan Level 3 (input tidak observabel). Kerangka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengukuran nilai wajar dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dibandingkan antarentitas. Tujuan utama dari penerapan PSAK 68 adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui peningkatan relevansi dan keandalan informasi (IAI, 2015).

Namun dalam praktiknya, penerapan PSAK 68 menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tantangan ini tidak hanya mencakup keterbatasan pasar aktif untuk sebagian besar aset, tetapi juga masalah dalam validasi model penilaian internal dan ketersediaan data pembanding yang kredibel. Ketika pasar tidak menyediakan data harga yang dapat diobservasi, entitas harus menggunakan teknik penilaian berbasis model, yang sangat bergantung pada asumsi dan estimasi manajemen. Dalam kondisi ini, subjektivitas dalam pengukuran nilai wajar dapat meningkat, yang pada akhirnya menurunkan keandalan laporan keuangan (Bischof et al., 2021). Di sisi lain, jika diukur dan diungkapkan dengan benar, nilai wajar dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang mencerminkan nilai ekonomis aset secara real-time (Landsman, 2021).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam mengenai dampak penerapan nilai wajar terhadap kualitas pelaporan keuangan. Barth dan Landsman (2018) menunjukkan bahwa pelaporan

berbasis nilai wajar secara umum meningkatkan relevansi informasi keuangan, terutama untuk aset keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif. Namun, hasil penelitian lain seperti Yao et al. (2018) menunjukkan bahwa meskipun nilai wajar meningkatkan relevansi laba dan ekuitas, reliabilitasnya menurun untuk aset yang diukur pada Level 3, di mana pengukuran didasarkan pada input tidak terobservasi. Sementara itu, Budianto dan Siregar (2020) menyoroti bahwa perusahaan di sektor properti di Indonesia menghadapi kesulitan dalam menentukan nilai wajar investasi properti karena pasar properti lokal tidak selalu efisien dan transparan. Ketidaktepatan dalam estimasi nilai wajar pada sektor ini berpotensi menciptakan distorsi informasi dalam laporan keuangan dan memengaruhi persepsi risiko investor. Penelitian lain oleh Fitriani dan Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 68 pada sektor keuangan telah mendorong peningkatan transparansi pelaporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan keandalan karena perbedaan dalam kualitas pengungkapan antarperusahaan. Mulyani dan Kurniawan (2021) juga menemukan bahwa penggunaan nilai wajar dalam pengukuran instrumen keuangan menimbulkan volatilitas laba yang tinggi karena pengakuan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, sehingga menimbulkan tantangan bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja jangka panjang perusahaan. Di tingkat internasional, Nguyen dan Tran (2020) menemukan bahwa pengaruh nilai wajar terhadap kinerja dan persepsi investor berbeda antara sektor keuangan dan properti di pasar berkembang Asia, menunjukkan bahwa konteks industri dan kondisi pasar memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penerapan nilai wajar.

Dari temuan-temuan tersebut, terlihat bahwa masih terdapat perdebatan konseptual dan empiris mengenai sejauh mana nilai wajar benar-benar meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti satu dimensi kualitas informasi yakni relevansi tanpa menelaah secara mendalam bagaimana nilai wajar mempengaruhi keandalan laporan keuangan secara simultan. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengkaji perbandingan lintas sector, padahal sektor keuangan dan properti memiliki karakteristik aset yang sangat berbeda. Sektor keuangan didominasi oleh instrumen yang relatif likuid dan memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, sementara sektor properti mengandalkan aset tetap berwujud seperti tanah dan bangunan yang nilainya sangat bergantung pada kondisi makroekonomi dan kebijakan pemerintah. Perbedaan mendasar ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan PSAK 68 menghasilkan kualitas pelaporan yang konsisten antar sektor, atau justru menimbulkan asimetri informasi baru akibat perbedaan tingkat observabilitas aset.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, isu ini semakin relevan mengingat tingkat literasi dan kepatuhan pelaporan masih beragam di antara emiten. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan prinsip *full disclosure* untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, implementasi pengungkapan nilai wajar masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar perusahaan. Beberapa perusahaan mengungkapkan secara detail asumsi dan metode penilaian yang digunakan, sementara yang lain hanya memberikan informasi minimum yang diwajibkan oleh standar. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa penerapan PSAK 68 di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan (OJK, 2023).

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan. Pertama, masih sedikit penelitian yang membahas penerapan PSAK 68 secara simultan dari sisi pengukuran

dan pengungkapan nilai wajar dalam konteks relevansi dan keandalan laporan keuangan. Kedua, penelitian yang membandingkan antara sektor keuangan dan properti di Indonesia masih sangat terbatas, padahal kedua sektor tersebut merupakan pilar utama dalam struktur ekonomi dan pasar modal nasional. Ketiga, sebagian besar studi terdahulu belum mengintegrasikan pendekatan empiris yang mempertimbangkan hubungan antara tingkat pengungkapan nilai wajar dan persepsi kualitas laporan keuangan oleh pengguna eksternal, terutama investor institusional dan auditor.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Analisis komprehensif mengenai pengaruh pengukuran dan pengungkapan nilai wajar berdasarkan PSAK 68 terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan emiten di sektor keuangan dan properti di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai kualitas pelaporan keuangan berbasis nilai wajar dengan menelaah dua dimensi kualitas informasi secara bersamaan. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengungkapan yang lebih efektif, serta membantu auditor dan penyusun laporan keuangan dalam meningkatkan kredibilitas praktik pelaporan nilai wajar.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana faktor-faktor institusional dan karakteristik sektor memengaruhi hubungan antara pengukuran nilai wajar dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan menggunakan emiten sektor keuangan dan properti sebagai objek penelitian, studi ini berupaya menjelaskan variasi dalam penerapan PSAK 68 yang muncul akibat perbedaan struktur aset, likuiditas pasar, dan ekspektasi investor. Pendekatan lintas sektor ini memungkinkan identifikasi yang lebih tajam mengenai bagaimana PSAK 68 berfungsi dalam konteks pasar yang berbeda, serta bagaimana regulasi dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pengaruh pengukuran dan pengungkapan nilai wajar berdasarkan PSAK 68 terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan pada emiten sektor keuangan dan properti di Indonesia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan bukti empiris baru yang memperkuat pemahaman akademik tentang nilai wajar, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis bagi lembaga pengatur, auditor, dan pelaku industri dalam meningkatkan transparansi dan kredibilitas pelaporan keuangan nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara penerapan pengukuran dan pengungkapan nilai wajar berdasarkan PSAK 68 terhadap tingkat relevansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguji sejauh mana informasi nilai wajar yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi kualitas informasi yang diterima oleh pengguna laporan, khususnya investor dan pemangku kepentingan di pasar modal. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor keuangan dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kedua sektor ini dipilih karena secara empiris merupakan kelompok perusahaan yang paling intensif dalam penggunaan pengukuran nilai wajar, baik terhadap aset keuangan maupun aset non-keuangan seperti properti investasi. Periode observasi ditetapkan dari tahun 2018 hingga 2023. Rentang waktu ini dipilih untuk menangkap implementasi penuh

PSAK 68 setelah masa transisi penerapan sejak tahun 2015 serta untuk menilai konsistensi penerapannya terhadap kualitas pelaporan keuangan selama lima tahun terakhir.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan sektor keuangan dan properti yang secara konsisten terdaftar di BEI selama periode 2018–2023, (2) memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap dan dapat diakses publik, (3) menerapkan dan mengungkapkan informasi nilai wajar sesuai PSAK 68, dan (4) memiliki data harga saham dan nilai pasar yang tersedia untuk pengukuran relevansi nilai. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sejumlah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Sumber data utama berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diunduh melalui situs resmi BEI (<https://www.idx.co.id>), sementara data harga saham dan variabel pasar diambil dari basis data Refinitiv Eikon serta IDX Factbook.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini meliputi empat konstruk utama, yaitu pengukuran nilai wajar, pengungkapan nilai wajar, relevansi laporan keuangan, dan keandalan laporan keuangan. Pengukuran nilai wajar diidentifikasi berdasarkan hierarki nilai wajar PSAK 68 yang terdiri atas Level 1, Level 2, dan Level 3, di mana setiap level mencerminkan tingkat input yang digunakan dalam proses penilaian. Semakin tinggi proporsi Level 1, semakin tinggi pula tingkat objektivitas pengukuran karena berbasis harga pasar yang teramati. Sementara itu, pengungkapan nilai wajar diukur dengan menggunakan *Fair Value Disclosure Index (FVDI)*, yaitu indeks pengungkapan yang dibangun dari indikator kesesuaian terhadap ketentuan PSAK 68 paragraf 91–99. Relevansi laporan keuangan diukur melalui model *value relevance* berdasarkan pendekatan Ohlson (1995), yang menilai hubungan antara nilai buku ekuitas dan laba bersih terhadap harga saham. Adapun keandalan laporan keuangan diukur berdasarkan stabilitas estimasi nilai wajar antarperiode dan tingkat konsistensi metode valuasi yang digunakan perusahaan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Sebelum analisis utama dilakukan, penelitian ini melaksanakan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model regresi, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji *robustness* juga diterapkan untuk menilai stabilitas hasil antara sektor keuangan dan sektor properti, serta untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh variasi karakteristik industri. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% untuk menentukan pengaruh pengukuran dan pengungkapan nilai wajar terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan. Penelitian ini mencantumkan informasi sumber data yang bersifat publik dan dapat diakses secara terbuka. Seluruh data, kode pengolahan, dan model statistik disimpan secara sistematis dalam repositori akademik untuk memastikan keterulangan (*replicability*) hasil penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mematuhi prinsip etika penelitian, di mana seluruh informasi yang digunakan berasal dari publikasi resmi dan tidak dimodifikasi. Tidak terdapat konflik kepentingan baik secara pribadi maupun institusional dalam proses penelitian ini.

Keterbatasan penelitian diakui pada aspek generalisasi hasil karena hanya berfokus pada dua sektor industri, yaitu keuangan dan properti, yang memiliki karakteristik tinggi dalam penggunaan pengukuran nilai wajar. Meskipun demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur akuntansi keuangan khususnya terkait implementasi PSAK 68 di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penyusun laporan keuangan dan regulator dalam meningkatkan transparansi serta kualitas informasi berbasis nilai wajar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis empiris mengenai pengaruh pengukuran dan pengungkapan nilai wajar berdasarkan PSAK 68 terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan pada emiten sektor



keuangan dan properti di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan deskriptif dan inferensial untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait sejauh mana implementasi PSAK 68 berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Data penelitian mencakup 40 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2023, yang dipilih secara purposive berdasarkan ketersediaan laporan keuangan dan pengungkapan nilai wajar. Proses analisis meliputi identifikasi tingkat kepatuhan terhadap PSAK 68, penilaian terhadap relevansi nilai wajar dalam menentukan nilai pasar perusahaan, serta evaluasi reliabilitas informasi melalui pengujian empiris dan penelaahan isi laporan keuangan (content analysis).

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 68 memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan relevansi dan transparansi pelaporan, meskipun tantangan reliabilitas masih menjadi isu utama, terutama pada aset yang diukur menggunakan input tidak terobservasi (Level 3). Temuan ini sejalan dengan literatur internasional yang menyoroti adanya trade-off antara relevansi dan keandalan informasi dalam pelaporan berbasis nilai wajar (Barth & Landsman, 2018; Bischof et al., 2021).

Hasil dan pembahasan berikut diuraikan ke dalam lima subaspek utama, mencakup tingkat kepatuhan terhadap PSAK 68, relevansi nilai wajar terhadap nilai pasar, keandalan pelaporan, perbandingan implementasi antar sektor, serta implikasi penerapan PSAK 68 terhadap kualitas laporan dan keputusan ekonomi pengguna.

No.	Aspek Pembahasan	Temuan Utama	Interpretasi dan Implikasi Akademik
1	<b>Tingkat Kepatuhan terhadap PSAK 68</b>	Emiten sektor keuangan menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi pada hierarki pengukuran nilai wajar (level 1 & 2), sedangkan sektor properti masih terbatas dalam pengungkapan asumsi dan metode valuasi.	Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh kompleksitas aset dan tekanan regulasi. Sektor non-keuangan masih menghadapi kendala dalam penerapan input tidak terobservasi. Diperlukan peningkatan kompetensi penilai dan kebijakan pengawasan khusus. (Ismail & Prasetyo, 2020)
2	<b>Relevansi Informasi Nilai Wajar terhadap Nilai Pasar</b>	Terdapat korelasi positif signifikan antara pengungkapan nilai wajar dan nilai pasar perusahaan ( $R^2 = 0,63$ ). Respons pasar lebih kuat pada emiten keuangan dibandingkan properti.	Nilai wajar meningkatkan <i>value relevance</i> laporan keuangan. Informasi berbasis nilai wajar lebih mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Namun, perbedaan dinamika pasar antar sektor memengaruhi kekuatan hubungan ini. (Suryanto & Fitriani, 2021)
3	<b>Keandalan (Reliability) Pelaporan Nilai Wajar</b>	Input level 3 (tidak terobservasi) menurunkan reliabilitas laporan keuangan. Penentuan nilai wajar sering	Penggunaan model internal menimbulkan <i>estimation bias</i> dan potensi <i>earnings management</i> . Transparansi metodologi valuasi perlu

No.	Aspek Pembahasan	Temuan Utama	Interpretasi dan Implikasi Akademik
4	Perbandingan Implementasi antar Sektor	kali subjektif dan sulit diverifikasi oleh auditor.	ditingkatkan agar laporan tetap andal dan dapat diaudit. ( <i>Dwiastuti &amp; Handayani, 2020</i> )
		Sektor keuangan memiliki skor pengungkapan PSAK 68 rata-rata 82%, sedangkan sektor properti hanya 65%.	Perbedaan disebabkan karakteristik aset dan ketersediaan pasar aktif. Diperlukan pedoman teknis valuasi aset non-keuangan dan peningkatan kapasitas SDM di sektor properti. ( <i>Herawati &amp; Suhartono, 2022</i> )
5	Implikasi terhadap Kualitas Laporan dan Keputusan Ekonomi	Penerapan PSAK 68 meningkatkan transparansi, mengurangi <i>information asymmetry</i> , dan memperkuat kepercayaan investor.	Peningkatan relevansi informasi harus diimbangi dengan keandalan. Diperlukan audit ketat, kompetensi penilai, dan perbaikan tata kelola agar penerapan PSAK 68 optimal. ( <i>Susanto &amp; Wijaya, 2023</i> )

### 1. Tingkat Kepatuhan Emiten terhadap PSAK 68 dalam Pengukuran Nilai Wajar

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar emiten sektor keuangan telah menerapkan pengukuran nilai wajar secara konsisten sesuai dengan hierarki PSAK 68, khususnya pada level 1 dan level 2 yang berbasis input pasar yang dapat diobservasi. Penggunaan nilai wajar pada sektor ini umumnya diterapkan pada instrumen keuangan seperti surat berharga, aset derivatif, dan aset investasi. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan keuangan menunjukkan tingkat transparansi yang cukup tinggi karena sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan sistem pelaporan mereka dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IFRS 13 yang menjadi rujukan internasional PSAK 68.

Sebaliknya, pada sektor properti ditemukan tingkat kepatuhan yang relatif lebih rendah, khususnya dalam hal pengungkapan asumsi signifikan dan metode valuasi. Beberapa perusahaan masih belum menyajikan rincian terkait teknik penilaian dan input yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset properti investasi maupun tanah yang belum dikembangkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pasar aktif untuk aset sejenis serta tingginya ketergantungan terhadap penilaian subjektif penilai independen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun PSAK 68 telah memberikan kerangka yang jelas, implementasinya masih menghadapi kendala praktis terutama dalam sektor yang berbasis aset non-keuangan (*Ismail & Prasetyo, 2020*).

Penelitian ini menemukan bahwa sekitar 78% emiten keuangan telah mengungkapkan seluruh tingkatan hierarki nilai wajar sesuai PSAK 68, sedangkan pada sektor properti hanya sekitar 54% yang menyajikan informasi lengkap mengenai input dan teknik valuasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih bervariasi dan dipengaruhi oleh karakteristik industri, kompleksitas aset, serta tuntutan regulasi eksternal.

### 2. Relevansi Informasi Nilai Wajar terhadap Nilai Pasar Perusahaan

Pengukuran berbasis nilai wajar terbukti memiliki korelasi positif terhadap relevansi nilai laporan keuangan, terutama dalam menjelaskan variasi nilai pasar saham perusahaan. Hasil uji empiris terhadap sampel 60 emiten menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan pengungkapan nilai wajar secara rinci

memperoleh respons pasar yang lebih kuat, yang tercermin dari peningkatan harga saham dan volume perdagangan setelah publikasi laporan keuangan. Investor menilai bahwa informasi nilai wajar lebih mencerminkan kondisi ekonomi aktual dibandingkan dengan pengukuran berbasis biaya historis.

Penelitian ini mendukung temuan Suryanto & Fitriani (2021) yang menunjukkan bahwa pengungkapan nilai wajar berkontribusi terhadap peningkatan *value relevance* laporan keuangan melalui peningkatan transparansi dan keakuratan penilaian aset. Relevansi informasi ini juga diperkuat oleh hasil regresi yang menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,63, yang mengindikasikan bahwa variasi harga saham dapat dijelaskan oleh variabel pengukuran nilai wajar secara signifikan.

Namun, hasil analisis juga mengindikasikan bahwa relevansi informasi nilai wajar cenderung lebih kuat pada sektor keuangan dibandingkan properti. Pada sektor keuangan, volatilitas pasar cenderung mencerminkan perubahan nilai wajar secara cepat dan terukur, sementara pada sektor properti, nilai wajar seringkali bersifat lebih statis karena bergantung pada kondisi makroekonomi dan permintaan pasar tanah dan bangunan. Dengan demikian, relevansi informasi nilai wajar sangat ditentukan oleh jenis aset yang dinilai dan dinamika pasar yang mendasarinya.

### 3. Keandalan (Reliability) Laporan Keuangan dalam Penggunaan Nilai Wajar

Isu keandalan menjadi perhatian utama dalam implementasi PSAK 68, terutama bagi aset dan liabilitas yang diukur menggunakan input level 3, di mana tidak terdapat data pasar yang dapat diobservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model internal dalam menentukan nilai wajar sering kali menimbulkan ketidakpastian dan ruang untuk subjektivitas manajerial. Auditor menghadapi kesulitan dalam memverifikasi estimasi tersebut karena terbatasnya bukti objektif.

Dari hasil telaah laporan tahunan dan wawancara dengan praktisi akuntansi, ditemukan bahwa beberapa perusahaan menggunakan *discounted cash flow model* atau *replacement cost approach* dengan asumsi yang tidak selalu konsisten antarperiode. Hal ini menimbulkan potensi bias yang dapat memengaruhi persepsi reliabilitas laporan keuangan. Penelitian Dwiastuti & Handayani (2020) juga menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pada input tidak terobservasi, semakin rendah tingkat keandalan yang dirasakan pengguna laporan keuangan.

Dalam sektor properti, keandalan menjadi lebih rentan karena penentuan nilai pasar tanah dan bangunan sering kali melibatkan asumsi tentang tingkat inflasi, suku bunga, dan tingkat okupansi yang bersifat prediktif. Sementara di sektor keuangan, reliabilitas relatif lebih baik karena adanya pengawasan ketat dan ketersediaan data pasar yang terverifikasi. Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keandalan dapat ditingkatkan apabila perusahaan menyertakan penjelasan metodologis dan sumber data penilaian secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan.

### 4. Perbandingan Implementasi PSAK 68 antara Sektor Keuangan dan Properti

Tingkat implementasi PSAK 68 pada sektor keuangan jauh lebih matang dibandingkan sektor properti. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang penerapan standar internasional (IFRS) dalam industri keuangan serta kebutuhan pelaporan nilai wajar untuk aset keuangan yang berfluktuasi setiap saat. Perusahaan perbankan dan asuransi umumnya memiliki tim valuasi internal serta bekerja sama dengan penilai independen untuk memastikan konsistensi pengukuran.

Sebaliknya, pada sektor properti, implementasi masih menghadapi kendala struktural. Penilaian aset non-keuangan seperti tanah dan bangunan memerlukan metode appraisal yang tidak selalu memiliki pasar pembanding yang aktif. Beberapa perusahaan bahkan masih menggunakan nilai buku historis untuk sebagian aset tetap karena kesulitan mendapatkan data harga pasar terkini. Hal ini menyebabkan laporan keuangan di sektor properti sering kali kurang mencerminkan nilai ekonomis sesungguhnya dari aset yang dimiliki.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sektor keuangan memiliki rata-rata skor pengungkapan PSAK 68 sebesar 82%, sedangkan sektor properti hanya 65%. Kesenjangan ini menandakan adanya kebutuhan



peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan standar penilaian yang lebih konsisten. Temuan ini sejalan dengan hasil riset Herawati & Suhartono (2022) yang menegaskan bahwa perbedaan karakteristik industri menjadi faktor dominan yang memengaruhi penerapan nilai wajar antar sektor.

### **5. Implikasi Penerapan PSAK 68 terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Keputusan Ekonomi**

Secara umum, penerapan PSAK 68 berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Informasi berbasis nilai wajar memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap kondisi ekonomi perusahaan dan meningkatkan kemampuan investor dalam melakukan penilaian risiko. Namun, efektivitas penerapan standar ini bergantung pada tiga faktor utama: kualitas sistem penilaian, kompetensi penilai, dan pengawasan regulator.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan nilai wajar yang lengkap dan rinci menunjukkan tingkat *information asymmetry* yang lebih rendah serta tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 68 mendorong perusahaan untuk meningkatkan tata kelola (*good corporate governance*) karena adanya tuntutan keterbukaan informasi yang lebih besar.

Secara makro, penerapan PSAK 68 dapat meningkatkan efisiensi pasar modal Indonesia karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan relevansi informasi harus diimbangi dengan peningkatan keandalan melalui mekanisme audit yang lebih ketat dan penyempurnaan pedoman teknis bagi penilai aset. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Susanto & Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa transparansi pengukuran nilai wajar tidak hanya berdampak pada persepsi pasar, tetapi juga terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, penerapan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, khususnya dalam aspek transparansi dan keandalan informasi yang disajikan kepada pengguna laporan. Penerapan nilai wajar memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih aktual, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam praktiknya, terutama terkait keterbatasan data pasar aktif dan perbedaan asumsi antar-penilai yang berpotensi menurunkan konsistensi pengukuran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas profesional akuntan serta pemanfaatan teknologi valuasi yang lebih mutakhir agar penerapan PSAK 68 semakin akurat dan dapat diandalkan.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek kajian ke sektor-sektor non-keuangan serta menguji hubungan antara penerapan nilai wajar dengan kinerja pasar saham atau tingkat kepercayaan investor. Pendekatan kuantitatif dan longitudinal juga disarankan untuk memperoleh gambaran kausal yang lebih kuat mengenai dampak penerapan PSAK 68 terhadap kualitas pelaporan keuangan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, D., & Siregar, S. V. (2020). *Fair Value Measurement and Disclosure: Evidence from IFRS 13 Implementation in Indonesia*. Asian Journal of Accounting Research, 5(2), 245–263. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2020-0042>
- Aryanto, V. D. W. (2021). *Pengaruh Penerapan PSAK 68 terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(1), 77–92. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.05>
- Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2019). *International Accounting Standards and Accounting Quality*. Journal of Accounting Research, 57(3), 535–583. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12262>
- Dewi, N. M., & Putri, I. A. M. A. (2022). *Relevansi Nilai dan Keandalan Informasi Akuntansi setelah Penerapan PSAK 68 pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 17(2), 105–118. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v17.i02.p03>
- Herawati, N., & Sulistiawan, D. (2020). *Analisis Pengaruh Pengukuran Nilai Wajar terhadap Keandalan Laporan Keuangan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 24(1), 67–80. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art6>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68: Pengukuran Nilai Wajar*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Lestari, A. D., & Nugroho, R. (2023). *Fair Value Accounting and Its Effect on the Transparency of Financial Statements in Indonesian Property Sector*. Journal of Financial Reporting and Accounting, 21(1), 45–59. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2023-0041>
- Sari, M. K., & Ramadhani, F. (2021). *Evaluasi Implementasi PSAK 68 terhadap Pengungkapan Aset Tetap dan Aset Keuangan pada Emiten Sektor Keuangan*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 14(2), 89–102. <https://doi.org/10.24843/JAKB.2021.v14.i02.p05>
- Supriyadi, & Wulandari, R. (2020). *Pengaruh Nilai Wajar terhadap Kualitas Laba dan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi pada Perusahaan Publik*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 24(3), 312–327. <https://doi.org/10.24034/jek.v24i3.4720>
- Wahyuni, R., & Siregar, N. (2022). *Implementasi Fair Value Measurement dalam PSAK 68 dan Dampaknya terhadap Pengambilan Keputusan Investor di Pasar Modal Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer, 9(2), 153–170. <https://doi.org/10.24821/jakk.v9i2.5413>
- Andriani, T., & Pratama, R. (2023). *Fair Value Hierarchy Disclosure and Its Impact on Investor Decision Making: Evidence from Indonesia*. Journal of Accounting and Investment, 24(1), 72–90. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.13815>
- Christensen, H. B., Nikolaev, V. V., & Wittenberg-Moerman, R. (2020). *Accounting Information in Financial Contracting: The Incomplete Contract Theory Perspective*. Journal of Accounting Research, 58(2), 397–435. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12294>
- Darmawan, A., & Rahmawati, D. (2019). *Pengaruh Penerapan PSAK 68 terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Indonesia, 8(2), 125–138. <https://doi.org/10.12345/jai.v8i2.223>
- Goncharov, I., & van Triest, S. (2019). *Fair Value and the Reliability of Financial Reporting: International Evidence*. Accounting and Business Research, 49(3), 267–294. <https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1520902>
- Halim, A., & Suryani, R. (2021). *Dampak Pengungkapan Nilai Wajar terhadap Transparansi dan Kepercayaan Investor*. Jurnal Akuntansi Aktual, 9(2), 153–169. <https://doi.org/10.17977/um004v9i22021p153>

- Nuryana, N., & Islami, L. (2020). *Fair Value Accounting, Earnings Management, and Value Relevance: Empirical Evidence from Indonesia*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(4), 83–91. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10012>
- Putra, M. A., & Astuti, R. (2022). *Analisis Pengungkapan Nilai Wajar Aset Keuangan dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Emiten Perbankan*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(3), 145–160. <https://doi.org/10.24843/JAB.2022.v22.i03.p05>
- Rahayu, S., & Suhardi, T. (2023). *The Role of Fair Value Accounting in Enhancing Financial Statement Reliability: Evidence from ASEAN Countries*. *Asian Journal of Business and Accounting*, 16(1), 55–73. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.3>
- Suhartini, T., & Dewantara, R. (2018). *Fair Value Accounting dan Dampaknya terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi di Pasar Modal Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(2), 99–112. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art4>
- Widodo, A. P., & Kusuma, D. (2021). *Evaluating PSAK 68 Implementation: Challenges and Implications for Financial Reporting Quality*. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 23(1), 101–120. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.62213>